

## INKLUSI KEUANGAN BAGI NELAYAN INDONESIA DI ERA DIGITAL

Rois Syarif Qoidhul Haq

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia- Jakarta. Email: roislpdp112@gmail.com

### Abstrak

Data tahun 2019 menunjukkan bahwa kurang dari 14,58 juta jiwa nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan. Disimpulkan bahwa inklusi keuangan dengan mensinergikan dan mengkolaborasikan teknologi, seperti *E-Log Book*, *Local Heroes* dan *Aruna Hub*, harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Indonesia. Kesuksesan inklusi keuangan dengan sinergi dan kolaborasi teknologi tersebut sangat tergantung pada peran aktif para pemangku kepentingan, yang terdiri dari Pemerintah, nelayan, offtaker, lembaga keuangan, industry terkait hasil tangkap nelayan.

Keywords: Inklusi Keuangan, Teknologi, Nelayan, Digitalisasi

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia menyandang status negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah, namun status tersebut tidak serta merta membuat para nelayan sejahtera mengingat banyak nelayan Indonesia hidup di garis kemiskinan (CNBC Indonesia, 2022). Salah satu faktanya adalah data pada tahun 2019 yang menunjukkan kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta nelayan belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan (Tempo.co, 2023).

Beberapa penyebabnya adalah nelayan yang masih mengandalkan tengkulak (CNBC Indonesia, 2022), nelayan yang belum diperlakukan sebagai kelompok yang mendesak mendapatkan literasi dan kemampuan pengelolaan keuangan, padahal siklus pendapatan nelayan cepat, bukan bulanan, dan tergantung pada jadwal melaut (Viva, 2022), jumlah tangkapan hanya sedikit meskipun ikan di lautan melimpah, karena hasil tangkapan nelayan local kalah bila dibandingkan dengan kapal-kapal besar yang telah memiliki teknologi tinggi (Tempo.co, 2023).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, antara lain menciptakan platform digital, menciptakan teknologi untuk menghubungkan langsung nelayan dengan market, baik pasar domestik maupun global, membantu para nelayan binaan menjual hasil tangkapan ikan secara online, dan menciptakan teknologi yang menghadirkan akses keuangan yang lebih mudah, fair, dan transparan buat nelayan (CNBC Indonesia, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berupaya untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana inklusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Indonesia.

### B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 1. Gambaran Umum Kemiskinan dan Nelayan di Indonesia

Beberapa literatur menyebutkan bahwa nelayan, terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional merupakan suatu kelompok masyarakat yang tergolong miskin, bahkan jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Imron, 2003). Kemiskinan tersebut sungguh suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas (lebih luas daripada wilayah darat) dan terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya (Imron, 2003).

Terkait kemiskinan, Shepherd (2013) menegaskan bahwa inti dari permasalahan kemiskinan kronis terletak pada dua hal utama, yakni politik dan cara bekerja lembaga atau institusi yang terkait. Politik dan cara bekerja lembaga terkait dalam menangani kemiskinan pada

suatu negara berelasi erat dengan hukum, yang berarti kebijakan penanganannya di Indonesia harus dilakukan oleh lembaga atau institusi negara

Relasi hukum pada kedua inti dimensi kemiskinan kronis, yakni politik dan cara bekerja lembaga atau institusi, menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan di Indonesia harus dilakukan oleh lembaga atau institusi negara yang memiliki kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat (Budiardjo, 2008). Tentunya dalam menanggulangi kemiskinan nelayan Indonesia, institusi negara yang berwenang harus menuntun para nelayan agar memaksimalkan pendapatannya dengan cara yang paling efektif dan efisien melalui sarana dan upaya yang memungkinkan untuk dijalankan.

## **2. Digitalisasi dan Keuangan Inklusif untuk Kesejahteraan Nelayan**

Digitalisasi merupakan sarana dan prasarana yang memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan menerapkannya secara komprehensif (Aruna, 2023). Digitalisasi pada ekosistem perikanan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional (Kemenko Perekonomian, 2022).

Salah satu konsep digitalisasi dalam perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017, mengenai standar data dan diseminasi secara elektronik dalam satu unit portal data, yang antara lain mengatur integrasi data kelautan dan perikanan (Aruna, 2023). Beberapa implementasinya adalah *E-Log Book*, *Local Heroes* dan *Aruna Hub*. *E-Log Book* penangkapan perikanan bertujuan meningkatkan *coverage level* kapal dengan mengumpulkan data perikanan tuna mulai dari jenis dan berat ikan yang dilaporkan oleh para nelayan (Aruna, 2023). Artinya, dengan berjalannya *e-log book*, maka pemantauan data yang berkaitan dengan status dan stok perikanan yang efisien akan menjadi acuan utama bagi regulasi yang mengatur kegiatan kapal penangkap ikan (Aruna, 2023). *E-log book* akan dijadikan data integrasi yang memuat pemanfaatan kuota dalam aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik (e-PIT) (Aruna, 2023). Kemudian, *Local Heroes* dan *Aruna Hub* sangat membantu para nelayan untuk lebih dekat dengan teknologi, sehingga dapat menerapkan teknologi dan data untuk mengoptimalkan pengelolaan di bidang perikanan. Keberadaan *Local Heroes* dan *Aruna Hub* ini diharapkan dapat menjangkau dan menggerakkan masyarakat pesisir di berbagai daerah untuk mau terlibat dan menerapkan wawasan keberlangsungan dalam kegiatan perikanan (Aruna, 2023).

Melalui sinergi dan kolaborasi program sebagai implementasi yang konkret berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), para pemangku kepentingan (yang mencakup Pemerintah, nelayan, offtaker, lembaga keuangan, industri, dan lain sebagainya) dapat melakukan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan (Kemenko Perekonomian, 2022). Yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana rumusannya terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/POJK.07/2016 tahun 2016 (BCA, 2023). Dibentuknya program inklusi keuangan ini adalah untuk menutup kesenjangan akan akses layanan keuangan antara *unbanked society* (masyarakat yang belum memiliki rekening bank) dengan masyarakat yang telah berhasil mengakses layanan bank (BCA, 2023).

Salah satu upaya untuk menutup kesenjangan di nelayan adalah dengan meningkatkan perhatian bank untuk masyarakat pesisir, yang selama ini dirasa masih kurang. Padahal, akses terhadap layanan keuangan sangat penting karena dapat mengurangi tingkat kemiskinan, termasuk untuk melepaskan nelayan dari jeratan utang rentenir, sebagaimana masih banyak nelayan yang mengakses modal usaha dari para rentenir karena belum sepenuhnya bisa mengakses permodalan dari perbankan (Ismadi, 2022). Peningkatan sistem keuangan yang inklusif diharapkan mampu untuk menutup angka kesenjangan tersebut.

Adanya sinergi dan kolaborasi berbagai program dalam rangka perluasan keuangan inklusif, nelayan tradisional dapat mengoptimalkan hasil perikanan melalui pengelolaan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi nelayan dengan melahirkan nelayan milenial (Kemenko Perekonomian, 2022).

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan inklusi keuangan dengan mensinergikan dan mengkolaborasikan teknologi, seperti *E-Log Book*, *Local Heroes* dan *Aruna Hub*, dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Indonesia. Namun, kesuksesannya sangat tergantung pada peran aktif para pemangku kepentingan, yang terdiri dari Pemerintah, nelayan, oftaker, lembaga keuangan, industry terkait hasil tangkap nelayan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aruna, Nakama (2023), "Pentingnya Digitalisasi Data Dalam Sustainable Fisheries Concept", tersedia di laman <https://aruna.id/id/2023/05/02/pentingnya-digitalisasi-data-dalam-sustainable-fisheries-concept/>, diakses 4 Mei 2023.
- BCA (2023), "Mengenal Apa Itu Inklusi Keuangan", tersedia di laman <https://www.bca.co.id/id/informasi/Edukatips/2023/02/20/08/28/mengenal-apa-itu-inklusi-keuangan#:~:text=Melalui%20peraturan%20yang%20diterbitkan%20oleh,masyarakat%20demi%20meningkatkan%20kesejahteraan%20masyarakat.>, diakses 4 Mei 2023.
- Budiardjo, Miriam (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- CNBC Indonesia (2022), "Digitalisasi Bisa Sejahterakan Petani & Nelayan, Ini Caranya", tersedia di laman <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20220916124915-25-372669/digitalisasi-bisa-sejahterakan-petani-nelayan-ini-caranya>, diakses 29 November 2022.
- Imron, Masyhuri (2003), Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, pp. 63-81.
- Ismadi (2022), "Inklusi Keuangan Lepaskan Nelayan dari Jeratan Rentenir", tersedia di laman <https://nusantaramaritimeneews.id/berita/inklusi-keuangan-lepaskan-nelayan-dari-jeratan-rentenir/>, diakses 29 November 2022.
- Kemenko Perekonomian (2022), "Melalui Digitalisasi Ekosistem Perikanan, Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan Tradisional", tersedia di laman <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3991/melalui-digitalisasi-ekosistem-perikanan-pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-nelayan-tradisional>, diakses 27 Oktober 2022.
- Shepherd, Andrew (2013), "How do we get to zero on poverty – and stay there?", in Erik Solheim, *Development Co-operation Report 2013: Ending Poverty*, Paris, OECD Publishing.
- Tempo.co (2023), "PR Pemerintah di Hari Nelayan Nasional: Masih Banyak Nelayan yang Miskin", tersedia di laman <https://nasional.tempo.co/read/1712131/pr-pemerintah-di-hari-nelayan-nasional-masih-banyak-nelayan-yang-miskin>, diakses 4 Mei 2023.
- Viva (2022), "Kejar Target Inklusi Keuangan, Nelayan Mendesak Dapat Literasi", tersedia di laman <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1464897-kejar-target-inklusi-keuangan-nelayan-mendesak-dapat-literasi>, diakses 5 Nopember 2022.